

**PEMBERDAYAAN PETANI JAGUNG OLEH UNIT
PELAKSANA TEKNIS- BALAI PENYULUHAN
(UPT-BP) MELALUI PROGRAM SEKOLAH
LAPANGAN PERTANIAN TEKNOLOGI TERPADU
(SL-PTT) DI KECAMATAN SUNGAI AUA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik*



**NURLENA
1101632/2011**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

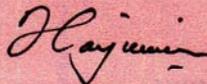
Judul : PEMBERDAYAAN PETANI JAGUNG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS-BALAI
PENYULUHAN (UPT-BP) MELALUI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN
PERTANIAN TEKNOLOGI TERPADU (SL-PTT) DI KECAMATAN
SUNGAI AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : NURLENA
Nim/Bp : 1101632/2011
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1003

Pembimbing II



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D
NIP. 19640208 199003 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa 29, Desember 2015 Pukul 10.00 s/d 12.00 Wib

**Pemberdayaan Petani Jagung oleh Unit Pelaksana Teknis-Balai Penyuluhan
(UPT-BP) Melalui Program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu
(SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat**

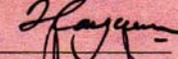
Nama : NURLENA
Nim/Bp : 1101632/2011
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2016

Tim Penguji:

	Nama	
Ketua	: <u>Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si</u>	1.
Sekretaris	: <u>Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D</u>	2.
Anggota	: <u>Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D</u>	3.
Anggota	: <u>Adil Mubarak, S.IP.M.Si</u>	4.

Tanda Tangan .

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengesahkan:

Dean FIS UNP



Prof. Dr. Syarif Anwar, M.Pd
NIP. 196216011989031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NURLENA**
Nim/Bp : 1101632/ 2011
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pemberdayaan Petani Jagung oleh Unit Pelaksana Teknis-Balai Penyuluhan (UPT-BP) Melalui Program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, April 2016

Yang Membuat Pernyataan



NURLENA
NI M. 1101632/2011

ABSTRAK

Nurlena: (2011/1101632). Pemberdayaan Petani Jagung oleh UPT-BP Melalui Program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat produksi jagung penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) yang dikelola oleh UPT-BP melalui Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan petani jagung oleh UPT-BP melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, UPT-BP Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat dan Kelompok Tani penerima BANSOS SL-PTT. Datadikumpulkan dengan melakukan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Alat pengumpul data dibantu dengan pedoman wawancara, dan observasi. Teknik menguji keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan petani jagung oleh UPT-BP melalui programSL-PTT di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat dengan melakukan berbagai kegiatan belum terlaksana dengan baik dan maksimal, hal ini terlihat dari masih kurangnya kepedulian dan kesadaran anggota kelompok tani jagung penerima BANSOS untuk mengikuti Sekolah Lapangan. Hambatan untuk mengatasi pelaksanaan SL-PTTdengan cara memberikan penyadaran kepada kelompok tani jagung pentingnya untuk mengikuti SL-PTT tersebut. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan Sekolah Lapangan setiap bulan secara berkala, menganjurkan petani jagung untuk mencabut tanaman yang terjangkit penyakit “bulai” dan merekomendasikan kelompok tani untuk mengajukan permohonan bantuan sarana pendukung pertanian.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemberdayaan Petani Jagung oleh UPT-BP Melalui Program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D sebagai dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Ibu Dra. Heni Chandra Gustina, Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dekan, Ketua Jurusan dan Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. .
4. Ibu Zakiah, S.Pt selaku Kepala UPT-BP Kecamatan Sungai Aua, Bapak Akhayar Lubis selaku Koordinator Penyuluh, Bapak Febri Utama, dan Ibu Willem Relma Yeniselaku Penyuluh Lapangan (PPL) yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Syafruddin, Bapak Mirjas, Bapak Apriman selaku Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Sungai yang telah penulis wawancarai sebagai informan penelitian yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa buat kedua orang tuaku tersayang Ibu Syahlinar dan Alm. Bapak Ahmad Nusidan suami tercinta Anthoni Subrata serta adik-adikku Rita Yulita, Abdul Rohim, April, dan Gisella Ramadhani yang telah memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah,Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
B. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Informan Penelitian	43
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data.....	43
E. Uji Keabsahan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	48
B. Temuan Khusus.....	50
C. Pembahasan.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Sekolah Lapangan Peranian Teknologi Terpadu	34
Gambar 2. Alur Sumber Pembiayaan SL-PTT	37
Gambar 3. Kerangka Konseptual	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial SL-PTT Jagung Tahun Anggaran 2014.....	3
Tabel 2.	Komposisi Penduduk Kecamatan Sungai Aua Tahun 2014 Menurut Umur dan Jenis Kelamin	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	83
Lampiran 2. Kegiatan Penyuluhan.....	86
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	87
Lampiran 4. Dokumentasi lahan jagung.....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usahatani, pemerintah membentuk Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT), termasuk di Kabupaten Pasaman Barat. SL-PTT merupakan program strategis Kementerian Pertanian yang merupakan tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan, dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumber daya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatannya menjadi lebih efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 9).

SL-PTT dalam melaksanakan kegiatannya mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah dalam mengembangkan usaha pertanian. Sumber pembiayaan pelaksanaan SL-PTT berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) untuk pemberdayaan sosial (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 62). Tujuan dari pemberian bantuan tersebut adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok tani padi dan jagung dalam mengelola dan mengembangkan usahatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial dalam pelaksanaan SL-PTT Kementerian Pertanian Cq Direktorat Jenderal Tanaman dengan penerima bantuan tersebut adalah kelompok tani. Alokasi

anggaran berupa Tugas Pembantuan yang diletakkan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten. Tata kelola pencairan dana Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok tani pelaksana SL-PTT melalui transfer uang langsung ke rekening kelompok tani atau gabungan kelompok tani, dengan jadwal pelaksanaan penyaluran Belanja Bantuan Sosial tersebut disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah Kabupaten/Kota (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 63).

Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari sebelas Kecamatan, yaitu Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo (LND), Sasak Ranah Pasisie, Kinali, Gunung Tuleh, Sungai Aua, Lembah Melintang, Koto Balingka, Ranah Batahan dan Sungai Beremas. Dari sebelas Kecamatan tersebut delapan Kecamatan diantaranya menerima dana Bantuan Sosial (BANSOS) SL-PTT jagung hibrida tahun Anggaran 2014. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman andalan Pasaman Barat dan menjadi penyuplai terbesar di Sumatera Barat. Kebutuhan terhadap komoditas jagung terus meningkat, baik untuk pangan maupun pakan dan industri. Untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional dan menekan volume impor, pemerintah telah mencanangkan program peningkatan produksi jagung sejak tahun 2007 dengan sasaran swasembada. Salah satu strategi dalam peningkatan nasional jagung adalah meningkatkan produktivitasnya.

Keputusan Bupati No:188.45/313/BUP-PASBAR/2014 tentang penempatan kelompok tani penerima dana Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kelompok Tani penerima BANSOS SL-PTT Jagung Hibrida Kawasan Pengembangan Tahun Anggaran 2014

Kecamatan	Nama Kelompok Tani	Luas (Ha)	Jumlah Dana (Rp)
Talamau	Karya Bersama	25	7.210.000
	Tunas Muda	25	7.210.000
	Maju Bersama	25	7.210.000
	Nusantara	25	7.210.000
	Panariman Saiyo	25	7.210.000
Pasaman	Lembah Saiyo	25	7.210.000
	Lingkin	25	7.210.000
	Sejahtera	25	7.210.000
	Banja Durian Ameh	25	7.210.000
	Sungai Jernih	25	7.210.000
Luhak Nan Duo	Keluarga	25	7.210.000
	Kayu Payung	25	7.210.000
	Makmur	25	7.210.000
	Setia Kawan	25	7.210.000
	Karya Tani	25	7.210.000
Kinali	Lubuk Gadang	25	7.210.000
	Tani Jaya	25	7.210.000
	Sakato	25	7.210.000
	Tegal Jaya	25	7.210.000
	Tunas Muda	25	7.210.000
	Mitra Bersama	25	7.210.000
	Saiyo Sakato	25	7.210.000
Gunung Tuleh	Koto Padang	25	7.210.000
	Rimbo Piatu	25	7.210.000
	Bukik Bungo Ladiang	25	7.210.000
	Maju Bersama	25	7.210.000
	Karya Bersama	25	7.210.000
Sungai Aua	Salak Jaya	25	7.210.000
	Botuong Putih	25	7.210.000
	Bungo Tani	25	7.210.000
	Semoga Jaya	25	7.210.000
Lembah Melintang	Bersatu Maju	25	7.210.000
	Gading Permai	25	7.210.000
	Tanjung Harapan	25	7.210.000
	Andalan	25	7.210.000
	Bukit Sembilan	25	7.210.000
Sei Beremas	Mekah Tani I	25	7.210.000
	Sahata	25	7.210.000
	Usaha Mandiri	25	7.210.000
Total	40	1.000	288.400.000

(sumber Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat)

Walaupun demikian, pada kenyataannya di Kecamatan Sungai Aua produksi jagung hibrida 4-7 ton/ha dalam sekali masa tanam. Rata-rata petani jagung menanam hanya sekali dalam setahun. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat produksi jagung hibrida masih rendah dari target yang telah ditentukan. Secara maksimal jagung hibrida bisa memproduksi 9-10 ton/ha dalam satu kali tanam jagung. Penyebab kegagalan atau produksi rendah tersebut adalah perencanaan taman jagung oleh petani belum sesuai dengan pencairan dana Bantuan Sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Keadaan inilah yang membuat petani jagung tidak berdaya. Pada saat penanaman bibit jagung diperlukan musim penghujan, tetapi pada saat tanaman jagung sudah berumur satu sampai dua bulan keatas dibutuhkan musim panas, keadaan musim inilah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah saat pencairan dana Bantuan Sosial, sebab salah perencanaan akan menyebabkan produksi panen jagung rendah atau gagal panen.

Salah satu kelompok yang mengalami produksi rendah tersebut adalah kelompok tani Bersatu Maju di Kecamatan Sungai Aua. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syafruddin, ketua kelompok tani Bersatu Maju, bahwa:

“produksi yang dihasilkan berkisar 0-4 ton/ha. Pada tahun 2014 terjadi gagal panen yang menyebabkan petani jagung mengalami kerugian yang sangat besar. Pada saat jagung berumur satu setengah bulan dilakukan pemupukan. Satu minggu setelah pemupukan dilakukan, terjadi banjir bandang yang mengakibatkan lahan terendam selama satu minggu sehingga jagung mati dan layu setelah air surut. Dampaknya petani jagung mengalami gagal panen, kami terpaksa menanam bibit jagung hibrida yang baru dan mengeluarkan biaya tambahan besar seperti membeli kembali bibit, pupuk, pemberantas hama dan racun rumput, dll. Jangankan mendapatkan untung malah merugi/ gagal panen”(Wawancara, 10 April 2015).

Upaya yang dilakukan pelaksana SL-PTT untuk meningkatkan produksi jagung adalah menyusun usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan, dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumber daya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan, sehingga usahatannya berproduktivitas tinggi melalui pertemuan antara petani jagung dengan penyuluh lapangan atau sering juga dikenal dengan Sekolah Lapangan (SL). SL dalam satu kali tanam jagung melakukan pertemuan antara petani jagung dengan penyuluh lapangan dari Unit Pelaksana Teknis-Balai Penyuluhan (UPT-BP) Kecamatan Sungai Aua, sebanyak 5-6 kali pertemuan. Dalam pertemuan inilah para petani jagung bisa tukar-menukar informasi dan pengalaman sesama petani dan penyuluh lapangan. Setiap pertemuan topiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi petani jagung.

Pada saat dilakukan pertemuan hanya sedikit petani jagung yang hadir. Lokasi lahan petani yang berpencar-pencar menyulitkan petani dan penyuluh untuk saling tukar-menukar informasi dan berbagi pengalaman. Kondisi inilah yang menyebabkan pengetahuan dan pengalaman petani jagung masih rendah. Penyerapan ilmu oleh petani jagung juga dipengaruhi oleh pendidikan dan adat istiadat setempat. Semakin tinggi pendidikannya maka ilmu dan informasi yang diberikan penyuluh lapangan mudah diterima dan diaplikasikan.

Penanaman jagung yang optimal dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Kecamatan Sungai Aua para petani jagungnya melakukan penanaman satu

kali dalam setahun. Hal ini berpengaruh besar terhadap peningkatan produksi jagung pertahunnya. Selain kurang optimalnya penanaman jagung, masalah pemasaran juga menjadi sorotan. Masalahnya adalah belum adanya Sistem Kemitraan antara petani jagung dengan agen resmi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menampung hasil produksi para petani jagung. Kebanyakan dari petani jagung menjual hasil panennya pada agen. Harga yang ditetapkan setiap agen berbeda-beda, sehingga harga jagung tidak sama dan tidak stabil. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Akhyar Lubis, koordinator penyuluh Kecamatan Sungai Aua, bahwa:

“Sungai Aua belum mencapai target produksi maksimal di banding Kecamatan lain seperti Luhak Nan Duo yang telah mencapai target maksimal yaitu 9-10 ton/ha sementara di Sungai Aua masih 4-7 ton/ha. Selain produksi yang belum maksimal kurangnya kesadaran petani untuk menghadiri dan mengikuti Sekolah Lapangan juga mempengaruhi produksi. Dalam pemasaran hasil panen, masih tergantung petani jagung sendiri, sebaiknya dalam mengelola hasil panen harus ada sistem kemitraan supaya harga jagung stabil. Dalam melakukan Sekolah Lapangan penyuluh di lapangan berjumlah tiga orang untuk seluruh kelompok di Sungai Aua” (Wawancara, 17 April 2015).

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pemberdayaan Petani Jagung oleh Unit Pelaksana Teknis – Balai Penyuluhan (UPT-BP) melalui Program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat”.

B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Target produksi jagung belum maksimal
2. Perencanaan petani jagung untuk masa tanam belum sesuai dengan pencairan dana Bantuan Sosial dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Ketidakberdayaan petani jagung dalam meningkatkan hasil panen
4. Gagal panen atau produksi rendah masih sering terjadi
5. Pegetahuan dan kemampuan petani terhadap tanaman jagung masih kurang
6. Kurangnya kesadaran petani jagung untuk menghadiri dan mengikuti Sekolah Lapangan
7. Penanaman Jagung masih satu kali dalam satu tahun
8. Belum adanya sistem kemitraan antara petani jagung dengan agen resmi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pemasaran hasil produksi jagung
9. Pemberdayaan petani jagung oleh Unit Pelaksana Teknis –Balai Penyuluhan (UPT-BP) melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat masih banyak menemui kendala-kendala.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pemberdayaan petani jagung dalam rangka meningkatkan

produksi panen petani jagung di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Pelaksanaan program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan petani jagung oleh UPT-BP di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi UPT-BP dalam pelaksanaan program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa upaya yang dilakukan UPT-BP untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan petani jagung melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ruang lingkup penelitian ini sangat luas dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan, maka fokus masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pemberdayaan petani jagung oleh Unit Pelaksana Teknis- Balai Penyuluhan (UPT-BP) melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu

(SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat dalam mengantarkan petani jagung yang mandiri dan sejahtera.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan petani jagung oleh Unit Pelaksana Teknis –Balai Penyuluhan (UPT-BP) melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) yang dilakukan di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat
2. Mengetahui kendala yang dihadapi UPT-BP Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan pemberdayaan petani jagung melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT).
3. Mengetahui upaya yang dilakukan UPT-BP Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat untuk mengatasi kendala dalam pemberdayaan petani jagung melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT).

E. Mamfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, untuk mengambil kebijakan dan meningkatkan keberhasilan program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT)
- b. Masyarakat, dapat mengetahui kendala dalam pemberdayaan petani jagung agar dapat meningkatkan hasil produksi jagung di masa yang akan datang.
- c. Peneliti lanjutan, sebagai dasar pijakan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan pemberdayaan petani jagung.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1) Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dapat diartikan dengan membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan/kemampuan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan “*empowerment*” dalam bahasa Inggris. Sejalan dengan itu, konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya.

Menurut Djohani (dalam Oos M. Anwas, 2014: 49) Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan. Pemberdayaan (*empowerment*) menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Menurut Carlson & Macauley (dalam Harry Prima Putra, 2011: 35) pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Sementara menurut Jim Ife (dalam Zubaedi, 2013: 74-75) pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skills to increase their capacity*

to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community).

Menurut Aprillia, dkk (2014: 94-95) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Aprillia, dkk, 2014: 93). Menurut Sumodiningrat (dalam Aprillia, dkk, 2014: 93) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan

utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut (Aprillia, dkk, 2014: 124).

Menurut Persons (dalam Oos M. Anwas, 2014: 49) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya menurut Ife (dalam Oos M. Anwas, 2014: 49) pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Menurut Vitayala (dalam Zubaedi, 2013: 79) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat akan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan pelayanan). Pendampingan yang dapat mengerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk mempersiapkan masyarakat yang mandiri dan bisa

terlepas dari kemiskinan dan kebodohan serta keterbelakangan. Dalam arti lain, pemberdayaan merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat.

Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan komunitas. Pemberdayaan yang bersifat individu merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kemandirian. Keberdayaan individu berarti seseorang yang bisa memimpin atau mengatur dirinya berperan aktif dalam pembangunan, memiliki kemampuan dan daya saing sesuai dengan potensi dan keinginan yang dimilikinya. Pemberdayaan yang bersifat komunitas berarti proses meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas tertentu untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri.

Menurut Latama Gunarto (dalam Zubaedi, 2013:76) Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi *Asian Development Bank* (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik:

- 1) Berbasis lokal

Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal jika perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal *return to local resource* dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal. Prinsip daya saing komprehensif akan dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk mencapai daya saing kompetitif. Program pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat yang berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar penonton dan pemerhati diluar sistem, tetapi melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri.

2) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan di rancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bukannya meningkatkan produksi. Prinsip-prinsip yang dianut selama ini, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pada pemenuhan target-target variabel ekonomi makro. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan antara lain berupa pembentukan usaha kemitraan yang mutualistis antara orang lokal (orang miskin) dengan orang yang lebih mampu.

3) Berbasis kemitraan

Kemitraan akan membuka akses orang miskin terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas.

4) Secara holistik

Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik berarti mencakup semua aspek. Untuk itu, setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Hal ini untuk menghindarkan masyarakat dari sifat ketergantungan kepada segala sesuatu.

5) Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan memerhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi dan sosial. Kekelanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah.

Menurut Wasistino (dalam Harry Prima Putra, 2011: 35) pemberdayaan dapat dibedakan menjadi empat macam dilihat dari sasaran dan ruang lingkungannya yaitu: pemberdayaan pada individu anggota organisasi atau anggota masyarakat, pemberdayaan pada tim atau kelompok masyarakat, pemberdayaan pada organisasi, dan pemberdayaan pada masyarakat secara keseluruhan. Secara lebih rinci, menurut Slamet (dalam Oos M. Anwas, 2014:49) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Oos M. Anwas (2014: 58-60) dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip ini menjadi acuan sehingga

pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Pemberdayaan dilakukan dengan cara demokratis dan menghindari paksaan
- 2) Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi klien/ sasaran
- 3) Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan
- 4) Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat
- 5) Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan
- 6) Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan
- 7) Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat
- 8) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan
- 9) Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar sepanjang hayat
- 10) Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya

- 11) Pemberdayaan diarahkan untuk mengerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya
- 12) Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bakal menuju kemandirian
- 13) Petugas atau agen yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat
- 14) Pemberdayaan perlu melibatkan sebagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya.

Menurut Dahama dan Bhatnagar (dalam Totok Mardikanto, 2015:106) prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

- 1) Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
- 3) Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
- 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Pemberdayaan harus dilaksanakan

dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.

- 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu mengerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
- 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi disini, bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan masyarakat sasarnya.
- 7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ingin dikerjakan. Dengan perkataan lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.

- 8) Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan menerapkan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi sarannya.
- 9) Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal untuk membantu kegiatan pemberdayaannya.
- 10) Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu dengan fungsinya sebagai penyuluh.
- 11) Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai suatu kesatuan dari unit sosial.
- 12) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Totok Mardikanto (2015:109) dalam pemberdayaan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usahatani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better living*). Selaras dengan itu, tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut (Aprillia, dkk, 2014: 153-154):

- 1) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

2) Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan setiap kehidupan keluarga dan masyarakat.

6) Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

d. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasasmita (dalam Totok Mardikanto, 2015: 163) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

- 1) Upaya itu harus terarah (*targeted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhan.
- 2) Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikut sertakan masyarakat yang akan menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- 3) Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan terlalu luas kalau penanganannya

dilakukan secara individu, karena itu seperti yang telah disinggung sebelumnya pendekatan kelompok adalah yang paling efektif. Disamping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus menerus dibina dan dipelihara secara *sating* menguntungkan dan memajukan.

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Totok (2015: 168), strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 5P yaitu:

- a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari

terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan bersaha.

Dalam hubungan ini, Mardikanto (2015:172) menyimpulkan bahwa apapun strategi pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan upaya-upaya:

- 1) Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan, kebijakan, sosial, financial dari beberapa pihak terkait
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana kerja pada fasilitator

4) Memobiliasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat

Upaya pemberdayaan, seperti yang dikatakan Kartasmita (dalam Zubaedi, 2013: 79-80) harus dilakukan melalui tiga arah:

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan potensi-potensi yang telah dimiliki.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Artinya, langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar, serta sarana prasana lainnya.
- 3) Melindungi masyarakat (*protection*). Hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah pencegahan persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

f. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2015: 199-204) pada perkembangan terakhir diterapkan berbagai beragam metode pemberdayaan masyarakat “partisipatif” berupa:

1) *Rapid Rural Appraisal (RRA)*

RRA merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktik, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Bahaya dari pelaksanaan kegiatan RRA adalah, sering kali apa yang dilakukan oleh tim RRA bahwa mereka telah melakukan praktik “partisipatif”, meskipun hanya dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan bertanya langsung kepada para informan yang terdiri dari warga masyarakat setempat.

2) *Participatory Rapid Appraisal (PRA)* atau penilaian desa secara partisipatif. PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif, yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan.

3) *Fokus Group Discussion (FGD)* atau diskusi kelompok yang terarah.

FGD merupakan interaksi individu-individu yang oleh seorang pemandu dirahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermati. Pelaksanaan FGD dirancang sebagai diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku-kepentingan suatu program, melalui diskusi yang partisipatif dengan dipandu atau

difasilitasi oleh seorang pemandu dan sering kali juga mengundang narasumber.

4) *Participatory Learning And Action (PLA)* atau proses belajar dan mempraktikkan secara partisipatif. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu sebagai “*learning by doing*” atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (melalui: ceramah, curah-pendapat, diskusi, dll) tentang suatu topik seperti: pesemaian, pengolahan lahan, perlindungan hama tanaman, dll. yang segera setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan *rill* yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.

5) Sekolah Lapangan atau SL (*farmers Fiel School/FFC*)

SL diterapkan pada perlindungan hama terpadu, karena itu kemudian dikenal Sekolah Lapangan Perlindungan Hama Terpadu (SL-PHT). Sebagai metode pemberdayaan masyarakat, SL merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*), tentang alternatif pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

6) Pelatihan partisipatif

Pemberdayaan masyarakat banyak sekali dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan. Kegiatan pemberdayaan dapat di pandang sebagai suatu proses pendidikan non-fomal atau pendidikan luar sekolah. Ini berarti bahwa kegiatan pemberdayaan bukanlah kegiatan yang bersifat mendadak: atau incidental, melainkan harus terencana atau direncanakan sebelumnya. Di samping itu, sesuai dengan prinsip-prinsipnya, setiap kegiatan pemberdayaan harus mengacu pada kebutuhan yang (sedang) dirasakan penerima mamfaatnya, baik yang berkaitan dengan kebutuhan kini, dan kebutuhan masa datang (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang). Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan mamfaat atau memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan “*scooping*” atau penelusuran tentang program yang diperlukan dan analisis kebutuhan atau “*need assessment*”. Substansi materi pelatihan selalu mengacu pada kebutuhan peserta. Karena itu, sebelum pelatihan dilaksanakan, selalu diawali dengan kontrak-belajar, yaitu kesepakatan tentang substansi materi, urutan-urutan, tata-waktu, dan tempat.

2) Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT)

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efesiensi usahatani

melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifikasi lokasi. PTT merupakan inovasi baru untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam peningkatan produktivitas. Komponen teknologi PTT ditentukan bersama-sama petani melalui analisis kebutuhan teknologi (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 28).

Komponen teknologi PTT dasar/*compulsory* adalah teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan disemua lokasi. Komponen teknologi PTT pilihan adalah teknologi pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan. Komponen teknologi PTT pilihan dapat menjadi *compulsory* apabila hasil Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) memprioritaskan komponen teknologi yang dimaksud menjadi keharusan untuk memecahkan masalah utama suatu wilayah, demikian pula sebaliknya bagi komponen teknologi dasar.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yaitu:

- a. Terpadu: PTT merupakan suatu pendekatan agar sumber daya tanaman, tanah dan air dapat dikelola dengan sebaik-baiknya secara terpadu.
- b. Sinergis: memanfaatkan teknologi pertanian terbaik, dengan memperhatikan keterkaitan yang saling mendukung antar komponen teknologi

- c. Spesifik lokasi: PTT memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial budaya dan ekonomi petani setempat
- d. Partisipatif: petani turut serta dalam memilih dan menguji teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran dalam bentuk Laboratorium Lapangan (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 28).

a. Pengertian SL-PTT

SL-PTT adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumber daya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatannya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan SL-PTT dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap, penerapan budidaya yang baik dan benar, peningkatan produktivitas dan berkelanjutan serta replikasinya (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 9).

b. Model Pemberdayaan Petani Melalui SL-PTT

SL-PTT tidak terikat dengan ruang kelas, sehingga belajar dapat dilakukan di saung pertemuan petani dan tempat-tempat lain yang berdekatan dengan lahan belajar. Dalam SL-PTT terdapat satu unit Laboratorium Lapangan (LL) yang merupakan tempat bagi petani/keompok tani melaksanakan seluruh tahapan SL-PTT pada lahan tersebut. Dalam LL

kelompok tani dapat beberapa perlakuan teknologi dan teknologi dengan produksi terbaik merupakan teknologi spesifik lokasi dan dianjurkan untuk diterapkan pada lokasi setempat (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 35).

SL-PTT berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani atau kelompok tani, sekaligus tempat menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok serta sebagai percontohan bagi kawasan lainnya. Untuk itu, melalui SL-PTT diharapkan petani atau kelompok tani nantinya akan mampu mengambil keputusan atas dasar pertimbangan teknis dan ekonomis dalam setiap tahapan budidaya usahataniya serta mampu mengaplikasikan teknologi secara benar sehingga meningkatkan produksi dan pendapatannya (Ditjen Tanaman Pangan, 2014:33).

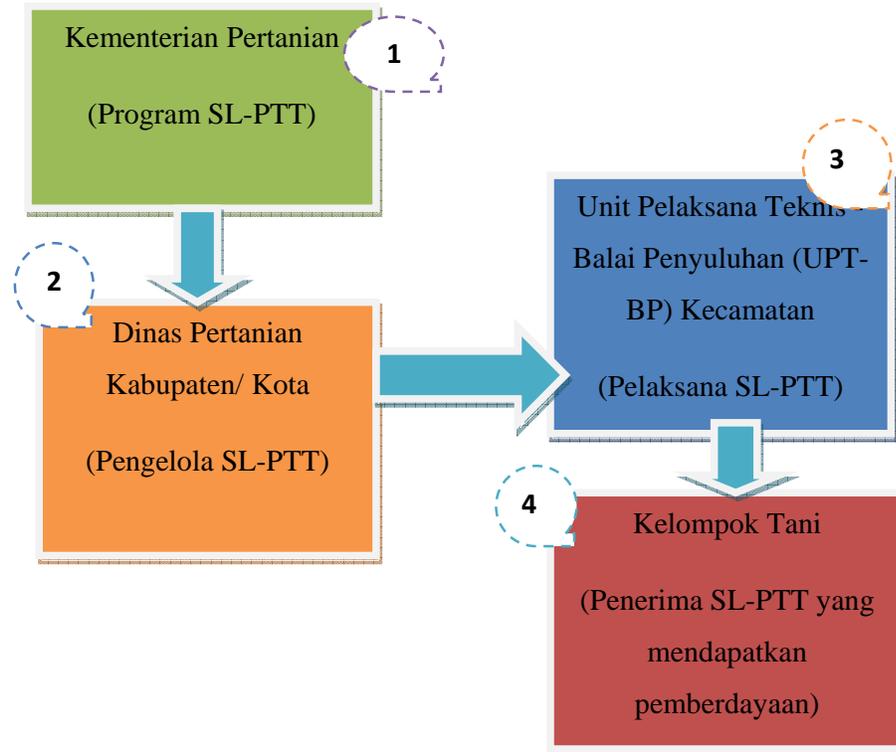
c. Sumber Pembiayaan SL-PTT

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan SL-PTT tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan pada Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) untuk pemberdayaan sosial (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 62). Tujuan dari pemberian Bantuan Sosial tersebut adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengelola dan mengembangkan usahataniya secara mandiri dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan difasilitasi oleh aparat Provinsi/ Kabupaten Kota dengan menciptakan iklim kondusif sehingga masyarakat mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalahnya sendiri, serta mampu mengembangkan dan memperkuat dirinya sendiri untuk

menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna mengenali potensi yang dimiliki oleh masyarakat/ agribisnis (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 62).

Kemandirian dapat terwujud apabila kelompok mampu mengembangkan usahatani/kegiatannya secara musyawarah, transparan, akuntabel untuk dapat mandiri dalam mengelola kelembagaan, manajemen, usaha pertaniannya. Dengan demikian fokus pemberdayaan kelompok diarahkan untuk memotivasi anggota kelompok/gabungan kelompok dalam mengembangkan kelembagaan masyarakat, manajemen dan usaha-usaha produktif di bidang pertanian. Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok dalam mengembangkan usahatani secara partisipatif. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 63).

Pemberian Dana Bantuan Sosial (BANSOS) dalam SL-PTT adalah Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Tanaman, dengan penerima bantuan tersebut adalah kelompok tani. Alokasi anggaran berupa dana Tugas Pembantuan yang diletakkan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota pelaksana SL-PTT (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 63).



Gambar 1. Struktur Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT)

Mekanisme pencairan Dana Bantuan Sosial SL-PTT Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2014:

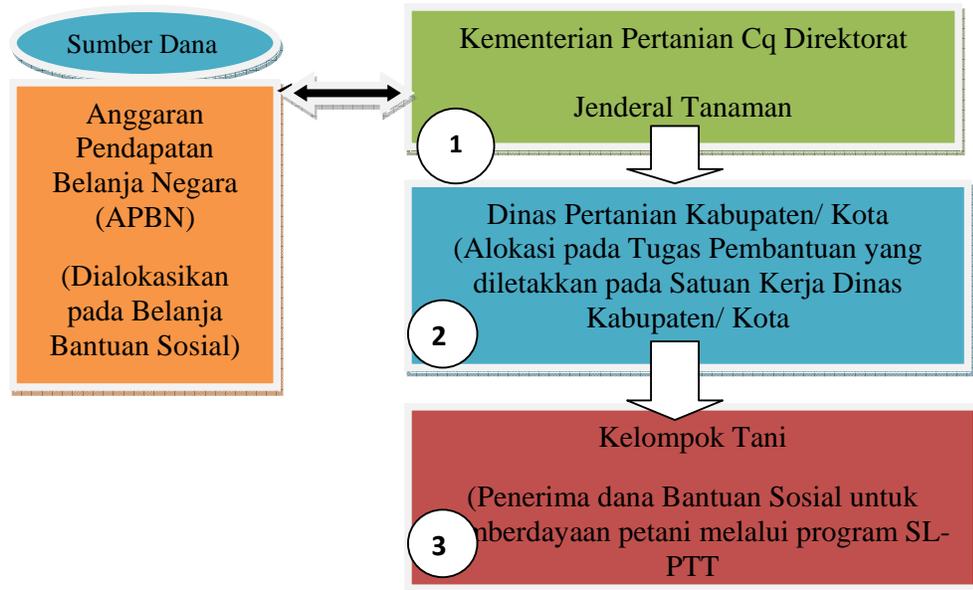
1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat/ Bupati Pasaman Barat menerbitkan SK penetapan kelompok tani penerima Dana Bantuan Sosial SL-PTT tahun anggaran 2014
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan usulan pencairan dana atas dasar SK Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat/ Bupati Pasaman Barat menerbitkan SK penetapan kelompok tani penerima

Dana Bantuan Sosial SL-PTT tahun anggaran 2014 melalui penerbitan SPP-LS . Kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat/ Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang penetapan kelompok tani penerima bantuan
 - b) Rencana Usulan Kelompok (RUK)
 - c) Surat perjanjian kelompok tani tentang kesediaan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT
 - d) Foto copy buku tabungan (rekening) Bank yang ditunjuk (BPD cabang Simpang Empat atau BPD Unit terdekat), dalam membuka rekening spesimen ditandatangani oleh ketua kelompok tani (rekap rekening terlampir)
3. Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian SPP-LS
 4. Berdasarkan hasil pengujian SPP, Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS secara penuh/ tanpa pemotongan pajak
 5. Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS kepada KPPN Lubuk Sikaping
 6. KPPN Lubuk Sikaping melakukan pengujian atas SPM-LS dan menerbitkan SP2D serta mentransfer dana ke rekening kelompok tani sasaran pada Bank BPD

7. Penggunaan dana langsung oleh kelompok tani dengan berpedoman kepada juknis kegiatan SL-PTT.

Upaya pencapaian sasaran produksi jagung tahun 2014, fokus utamanya adalah peningkatan produktivitas melalui SL-PTT berbasis kawasan seluas 260 ribu/ha. Sedangkan diluar fokus utama melalui upaya peningkatan produksi lainnya pada kawasan areal tanaman seluas 4,20 juta/ha. Peningkatan produktivitas dan produksi dilakukan dengan pembinaan, pendampingan dan bimbingan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan memanfaatkan benih bersubsidi, benih non subsidi atau benih dari sumber lainnya, pupuk bersubsidi dan swadaya murni petani serta *stakeholders*. Upaya peningkatan produksi jagung agar dilakukan dengan perluasan penggunaan benih jagung hibrida produktivitas tinggi disamping peningkatan pemupukan berimbang (Ditjen Tanaman Pangan, 2014: 24-26).



Gambar 2. Alur Sumber Pembiayaan Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT)

d. Ketentuan Pelaksana SL-PTT

Ketentuan pelaksana SL-PTT sebagai berikut:

- 1) Lokasi SL-PTT diusahakan berada pada satu hamparan atau kawasan, mempunyai potensi untuk ditingkatkan produktivitas , serta anggota kelompok taninya respon terhadap teknologi
- 2) Luas satu unit SL-PTT 25 ha yang di dalamnya terdapat satu unit LL seluas 1 ha
- 3) Peserta tiap unit SL-PTT diupayakan para petani yang berasal dari hamparan seluas 25 ha
- 4) Memiliki Pemandu Lapangan

e. Peserta dan Pemandu SL-PTT

- 1) Peserta /Kelompok Tani SL-PTT

Peserta SL adalah petani/ kelompok tani dengan syarat sebagai berikut:

- a) Kelompok tani tersebut masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- b) Telah menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK).
- c) Kelompok tani penerima bantuan SL-PTT ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
- d) Memiliki rekening yang masih berlaku/ masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMND/ Bank Daerah) yang

terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, harus membuka rekening di Bank.

- e) Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan SL-PTT sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya.
- f) Bersedia menambah biaya pembelian saprodi bilamana bantuan tersebut tidak mencukupi.
- g) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT.

2) Pemandu Lapangan

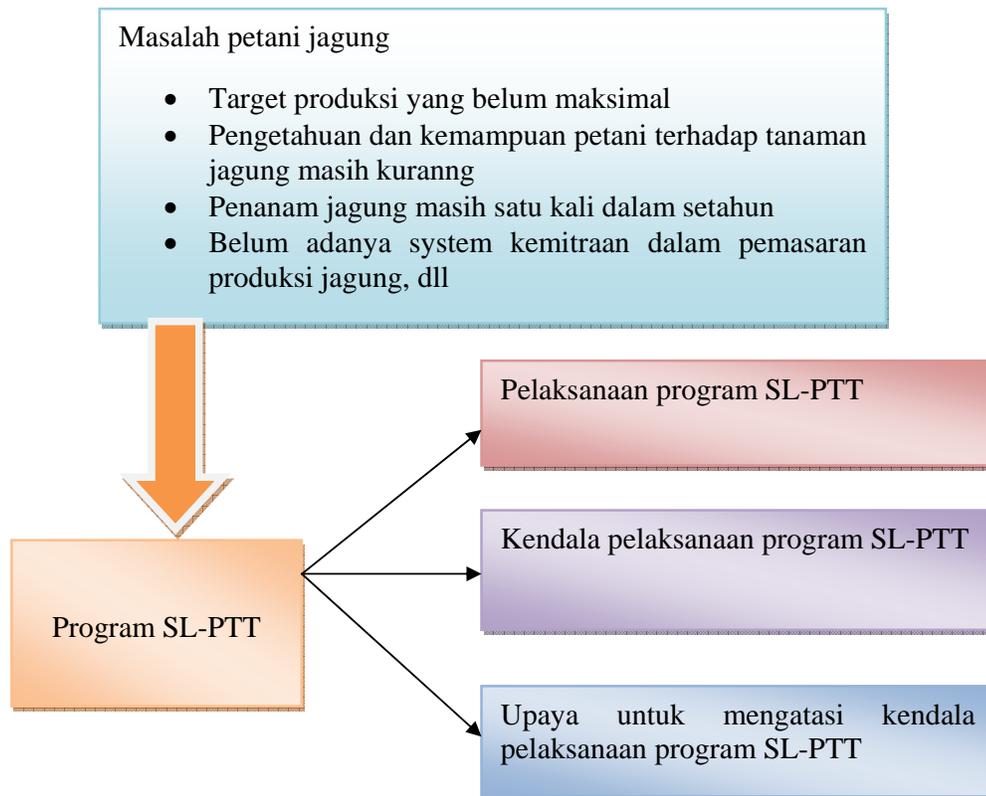
Pemandu lapangan adalah Petugas Lapangan (PPL), Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan Ka. UPT di Kecamatan yang telah mengikuti TOT/PL III sebelumnya, ataupun yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) serta didampingi oleh Peneliti Lapangan (LO) dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat. Sebagai Pemandu Lapangan harus berperan:

- a) Paham terhadap permasalahan, kebutuhan dan kekuatan yang ada di lapangan dan nagari.
- b) Dinamisator proses latihan SL-PTT sehingga menimbulkan ketertarikan dan lebih menghidupkan latihan.

- c) Motivator yang kaya akan pengalaman dalam berolah tanam dan dapat membantu membangkitkan kepercayaan diri para peserta SL.
- d) Konsultan bagi petani peserta SL-PTT untuk mempermudah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dan melaksanakan kegiatan usahatannya setelah kegiatan selesai.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual untuk meneliti pemberdayaan petani jagung melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sei Aur, Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberdayaan petani jagung oleh UPT-BP di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan petani jagung melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) pada umumnya berjalan kurang lancar serta kepedulian anggota kelompok tani dalam mengsucceskan program kurang.
2. Kendala yang dihadapi UPT-BP dalam pelaksanaan program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat adalah rendahnya kesadaran petani jagung untuk mengikuti Sekolah Lapangan, kemudian sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai.
3. Upaya yang dilakukan UPT-BP dalam mengatasi kendala pelaksanaan pemberdayaan petani jagung melalui program Sekolah Lapangan Pertanian Teknologi Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat adalah pihak UPT-BP Kecamatan Sungai Aua dan anggota kelompok tani serta pemuka masyarakat Kecamatan Sungai

Aua saling bekerjasama dalam mengsucceskan SL-PTT yang merupakan program pemerintah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

1. Diharapkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat agar dapat mengevaluasi program SL-PTT ke depan lebih baik dan program yang dibuat membuahkan hasil yang maksimal
2. UPT-BP Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat agar mengevaluasi program SL-PTT. Berkaitan dengan hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Sekolah Lapangan, diharapkan lebih memperhatikan petani jagung dan membina kelompok tani agar lebih bisa bersaing dengan Kecamatan lain yang memperoleh Dana Bantuan Sosial dalam bidang produksi panen dan lainnya.
3. Kelompok tani jagung di Kecamatan Sungai Aua agar lebih rajin untuk mengikuti Sekolah Lapangan supaya bisa meningkatkan produksi panen dan peningkatan kehidupan ekonomi petani jagung di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Theresia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan. 2014. *Petunjuk Teknis SLPTT Jagung dan Kedelai*. Kabupaten Pasaman Barat
- Ditjen Tanaman Pangan. 2014. *Pedoman Teknis SLPTT Padi dan Jagung*. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Haris, Herdiansyah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Harry Prima Putra. 2011. "Kebijakan Pemerintah Dalam Bentuk Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat". *Jurnal Fisip UMRAH* Volume 1 (Nomor 1 tahun 2011). Hlm 33-49..
- <https://www.google.com/search?q=Kebijakan+Pemerintah+Dalam+Bentuk+Pemberdayaan+dan+Partisipasi+Masyarakat> diakses 03 Maret 2015
- Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/051/ BUP-PASBAR/ 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/313/ BUP-PASBAR/ 2014 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) SL-PTT Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2014
- Masruri. 2010. "Analisis Efektifitas Program Nasional Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)". *Journal of Governance and Public policy* Volume 1 (Nomor 1 tahun 2014). <http://www.bing.com/search?q=masruri+pdf&qs=n&form=QBLH&pq=masruri+pdf&sc=8-9&sp=-1&sk=&cvid=450507c5aa124122988ffb2838707b46> diakses 06 Mei 2015
- Moleong, Lexi J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monografi Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014
- Oos, M. Anwas. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/ PMK. 05/ 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Website resmi Kabupaten Pasaman Barat www.pasamanbaratkab.go.id

Yohanes Leki Seran, Medo Kote dan Joko Triasno. 2011. “*Peningkatan Kapasitas Petani Jagung Melalui Uji Coba Teknologi Bersama Petani Dalam Mendukung Penguatan penyuluhan Pertanian*”. Jurnal Seminar Nasional Serealialia <https://www.google.com/search?q=Peningkatan+Kapasitas+Petani+Jagung+Melalui+Uji+Coba+Teknologi+Barsama+Petani+Dalam+Mendukung++Penguatan+penyuluhan+Pertania> diakses 03 Maret 2015

Yanuar Ikbar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditima.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group